

STRATEGI IMPLEMENTASI PENDIDIKAN BUDI PEKERTI YANG EFEKTIF DI SEKOLAH

*Ali Muhtadi**)

Abstract

Recently Indonesian nation has facing various social and moral problems. For this, strengthening moral and ethical education at schools had been done before, become more important. Various alternatives of ethics education strategies should be explored, implemented, and assessed effectively. There are at least four alternative strategies for implementing ethics education at schools, i.e. (1) integrating the ethics learning materials into all relevant school subject matters, (2) implementing ethics in daily life of school members through modeling, environment condition, rules and routines etc., (3) developing social activities programmes or projects containing ethical manners, i.e. visiting charity institutions, orphan and or handicapped children care institutions, and (4) strengthening parents participation and school community cooperation.

Keywords: *ethics and moral education, educational strategies.*

Pendahuluan

Persoalan pendidikan moral atau budi pekerti atau akhlak sampai saat ini masih menjadi fokus pembicaraan yang menarik untuk selalu dikaji dan dicarikan solusinya. Kenapa demikian? Hal ini karena sampai saat ini bangsa Indonesia masih senantiasa dihadapkan pada berbagai permasalahan sosial dan moral yang muncul seperti: (1) masih tingginya kasus tindakan kekerasan, baik yang terjadi antar rekan pelajar atau mahasiswa, antar masyarakat, dalam keluarga, maupun kekerasan yang dilakukan oleh preman atau juga oknum penguasa, (2) perampokan secara sadis yang disertai pemerkosaan atau pembunuhan, (3) meningkatnya dekadensi moral, etika/sopan santun para pelajar, (4) meningkatnya ketidakjujuran pelajar, seperti menyontek, suka bolos, suka mengambil barang milik orang lain, (5) berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua, guru, dan terhadap figur-figur yang seharusnya dihormati, (6) timbulnya gelombang perilaku yang merusak diri sendiri seperti perilaku seks bebas, penyalahgunaan narkoba, dan perilaku bunuh diri, (7) semakin lunturnya sikap saling hormat-menghormati dan rasa kasih sayang diantara manusia, serta semakin meningkatnya sifat kejam

*Dosen Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UNY

dan bengis terhadap sesama, (8) maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme serta berbagai persoalan lainnya yang mengarah pada terjadinya dekadensi moral bangsa.

Persoalan di atas mendeskripsikan bahwa orientasi pembangunan nasional ke arah terbentuknya jati diri bangsa yang disiplin, jujur, beretos kerja tinggi, serta berakhlak mulia belum dapat diwujudkan bahkan cenderung menurun. Mencermati persoalan demikian, orang kemudian berpaling pada pendidikan. Pendidikan nasional dianggap telah gagal dalam menyemai moral serta karakter bangsa yang berbudi pekerti luhur.

Ada tiga asumsi yang menyebabkan gagalnya pendidikan moral/budi pekerti ke dalam sikap dan perilaku siswa. *Pertama*, adanya anggapan bahwa persoalan pendidikan moral adalah persoalan klasik yang penanganannya adalah sudah menjadi tanggung jawab guru agama dan guru PPKn. *Kedua*, rendahnya pengetahuan dan kemampuan guru dalam mengembangkan dan mengintegrasikan aspek-aspek moral/budi pekerti ke dalam setiap mata pelajaran yang diajarkan. Dan *ketiga*, proses pembelajaran mata pelajaran yang berorientasi pada akhlak dan moralitas serta pendidikan agama cenderung bersifat *transfer of knowledge* dan kurang diberikan dalam bentuk latihan-latihan pengalaman untuk menjadi corak kehidupan sehari-hari.

Berangkat dari berbagai permasalahan di atas, maka banyak pihak mulai memikirkan kembali tentang perlunya pendidikan moral, pendidikan watak atau pendidikan budi pekerti diajarkan di sekolah-sekolah. Oleh karena itu, baik kurikulum berbasis kompetensi maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan yang saat ini berlaku, tetap menempatkan pendidikan budi pekerti sebagai pendidikan yang terintegrasi dengan mata pelajaran lain dalam pembelajaran. Namun demikian, sebagaimana dinyatakan dalam asumsi kegagalan pendidikan budi pekerti di depan bahwa mengintegrasikan suatu muatan pembelajaran ternyata bukan pekerjaan mudah bagi sebagian besar guru. Karenanya diperlukan strategi tertentu agar pembelajaran pendidikan budi pekerti efektif.

Makna Pendidikan Budi Pekerti

1. Makna Pendidikan

Ada berbagai ragam makna rumusan pendidikan yang telah dikemukakan oleh para pakar sesuai dengan sudut pandang dan konteks penggunaan masing-masing rumusan tersebut. Pendidikan (*education*) dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin "*educare*" berarti

memasukkan sesuatu (Hasan Langgulung, 1988: 4). Dalam konteks ini, istilah pendidikan dapat dimaknai sebagai proses menanamkan nilai-nilai tertentu ke dalam kepribadian anak didik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pendidikan dimaknai sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam suatu usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran itu sendiri". Dalam konteks formal, makna pendidikan sebagaimana tertulis dalam Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal I adalah:

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam konteks filsafat, Driyarkara (Ekosusilo & Kasihadi, 1989) mengemukakan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah usaha untuk "memanusiawikan manusia". Dalam konteks tersebut pendidikan tidak dapat dimaknai sekedar membantu pertumbuhan secara fisik saja, tetapi juga keseluruhan perkembangan pribadi manusia dalam konteks lingkungan manusia yang memiliki peradaban.

Pendidikan ditinjau dari sudut pandang masyarakat menurut Hasan Langgulung (1988:3) berarti:

Pewarisan kebudayaan dari generasi tua kepada generasi muda, agar hidup masyarakat tetap berkelanjutan. Atau dengan kata lain, masyarakat mempunyai nilai-nilai budaya yang ingin disalurkan dari generasi ke generasi agar identitas masyarakat tersebut tetap terpelihara.

Pandangan Hasan Langgulung tersebut sesuai dengan makna pendidikan yang diungkapkan oleh Kneller yang memaknai pendidikan sebagai proses pewarisan budaya. Menurut Kneller (1967:21):

Education is the process by which society, through schools, colleges, universities, and other institutions, deliberately transmits its cultural heritage - its accumulated knowledge, value, and skill from one generation to another.

Dengan kata lain, pendidikan merupakan proses dimana masyarakat melalui sekolah-sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan institusi lain dengan sengaja mewariskan warisan

budayanya-yakni berupa akumulasi pengetahuan, nilai, dan ketrampilan dari generasi ke generasi yang lain. Hal senada juga diungkapkan oleh Laska (1976:3), bahwa:

Education is one of the most important activities in which human beings engage. It is by means of the educative process and its role in transmitting the cultural heritage from one generation to the next that human societies are able to maintain their existence.

Artinya pendidikan merupakan salah satu aktivitas yang paling utama yang melibatkan tubuh manusia. Pendidikan merupakan sarana proses mendidik dan perannya di dalam mewariskan warisan budaya dari satu generasi kepada generasi berikutnya sehingga masyarakat manusia bisa memelihara keberadaan mereka.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa lembaga pendidikan sekolah pada dasarnya merupakan salah satu harapan masyarakat (sebagai wakil orang tua) untuk mewariskan atau menanamkan nilai-nilai moral/budi pekerti yang bersumber pada norma, etika, tradisi budaya yang dianutnya kepada generasi mereka. Oleh karena itu bagi masyarakat, lembaga pendidikan disamping diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berfikir dan ketrampilan hidup, juga diharapkan mampu mewariskan nilai-nilai budaya luhur kepada anak didiknya.

2. Makna Budi Pekerti

Secara etimologis, istilah budi pekerti, atau dalam bahasa Jawa disebut *budi pakerti*, dimaknai sebagai *budi* berarti pikir, dan *pakerti* berarti perbuatan. Berangkat dari kedua makna kata *budi* dan *pakerti* tersebut, Ki Sugeng Subagya (Februari 2010) mengartikan istilah *budi pakerti* sebagai perbuatan yang dibimbing oleh pikiran; perbuatan yang merupakan realisasi dari isi pikiran; atau perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran.

Menurut Ensiklopedia Pendidikan, budi pekerti diartikan sebagai kesusilaan yang mencakup segi-segi kejiwaan dan perbuatan manusia; sedangkan manusia susila adalah manusia yang sikap lahiriyah dan batiniyahnya sesuai dengan norma etik dan moral. Dalam konteks yang lebih luas, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (1997) mengartikan istilah budi pekerti sebagai sikap dan prilaku sehari-hari, baik individu, keluarga, masyarakat, maupun bangsa yang mengandung nilai-nilai yang berlaku dan dianut dalam bentuk jati diri, nilai persatuan dan kesatuan, integritas, dan kesinambungan masa depan dalam suatu sistem moral, dan yang menjadi pedoman prilaku manusia Indonesia untuk bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara dengan bersumber pada falsafah Pancasila dan diilhami oleh ajaran agama serta budaya Indonesia.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa budi pekerti pada dasarnya merupakan sikap dan perilaku seseorang, keluarga, maupun masyarakat yang berkaitan dengan norma dan etika. Oleh karena itu, berbicara tentang budi pekerti berarti berbicara tentang nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui ukuran norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, atau norma budaya/adat istiadat suatu masyarakat atau suatu bangsa.

3. Makna Pendidikan Budi Pekerti

Pada hakekatnya, pendidikan budi pekerti memiliki substansi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Haidar (2004) mengemukakan bahwa pendidikan budi pekerti adalah usaha sadar yang dilakukan dalam rangka menanamkan atau menginternalisasikan nilai-nilai moral ke dalam sikap dan perilaku peserta didik agar memiliki sikap dan perilaku yang luhur (berakhlakul karimah) dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam berinteraksi dengan Tuhan, dengan sesama manusia maupun dengan alam/lingkungan.

Secara konseptual, Pendidikan Budi Pekerti dapat dimaknai sebagai usaha sadar melalui kegiatan bimbingan, pembiasaan, pengajaran dan latihan, serta keteladanan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya yang berbudi pekerti luhur dalam segenap peranannya di masa yang akan datang. Pendidikan budi pekerti juga merupakan suatu upaya pembentukan, pengembangan, peningkatan, pemeliharaan dan perbaikan perilaku peserta didik agar mau dan mampu melaksanakan tugas-tugas hidupnya secara selaras, serasi, seimbang antara lahir-batin, jasmani-rohani, material-spiritual, dan individu-sosial. (Balitbang Puskur, Depdiknas, 2001).

Sedang secara operasional, pendidikan budi pekerti dapat dimaknai sebagai suatu upaya untuk membentuk peserta didik sebagai pribadi seutuhnya yang tercermin dalam kata, perbuatan, sikap, pikiran, perasaan, dan hasil karya berdasarkan nilai-nilai agama serta norma dan moral luhur bangsa Indonesia melalui kegiatan bimbingan, pelatihan dan pengajaran. Tujuannya agar mereka memiliki hati nurani yang bersih, berperangai baik, serta menjaga kesucilaan dalam melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan dan terhadap sesama makhluk (Balitbang Puskur, Depdiknas, 2001).

Tujuan pendidikan Budi Pekerti adalah untuk mengembangkan nilai, sikap dan perilaku siswa yang memancarkan akhlak mulia/budi pekerti luhur (Haidar, 2004). Hal ini mengandung arti bahwa dalam pendidikan Budi Pekerti, nilai-nilai yang ingin dibentuk adalah nilai-nilai akhlak yang mulia, yaitu tertanamnya nilai-nilai akhlak yang mulia ke dalam diri peserta didik yang kemudian terwujud dalam tingkah lakunya.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa hakekat dari tujuan pendidikan budi pekerti adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik. Indikator manusia yang baik, warga masyarakat dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum didasarkan atas nilai-nilai sosial tertentu yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat atau bangsa tersebut. Oleh karena itu, hakikat pendidikan budi pekerti dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pusbangkurandik (1997) mengkategorikan pendidikan budi pekerti menjadi tiga komponen, yaitu:

1. Keberagamaan, terdiri dari nilai-nilai; (a) kekhusukan hubungan dengan Tuhan, (b) kepatuhan kepada Agama, (c) niat baik dan keikhlasan, (d) perbuatan baik, (e) pembalasan atas perbuatan baik dan buruk.
2. Kemandirian, terdiri dari nilai-nilai; (a) harga diri, (b) disiplin, (c) etos kerja (kemauan untuk berubah, hasrat mengejar kemajuan, cinta ilmu, teknologi dan seni), (d) rasa tanggung jawab, (e) keberanian dan semangat, (f) keterbukaan, (g) pengendalian diri.
3. Kesusilaan, terdiri dari nilai-nilai; (a) cinta dan kasih sayang, (b) kebersamaan, (c) kesetiakawanan, (d) tolong-menolong, (e) tenggang rasa, (f) hormat menghormati, (g) kelayakan (kapatutan), (h) rasa malu, (i) kejujuran dan (j) pernyataan terima kasih, permintaan maaf (rasa tahu diri).

Adapun aspek-aspek yang ingin dicapai dalam pendidikan budi pekerti menurut Haidar (2004) dapat dibagi ke dalam 3 ranah, yaitu: *Pertama* ranah kognitif, mengisi otak, mengajarnya dari tidak tahu menjadi tahu, dan pada tahap-tahap berikutnya dapat membudayakan akal pikiran, sehingga dia dapat memfungsikan akalnya menjadi kecerdasan intelegensia. *Kedua*, ranah afektif, yang berkenaan dengan perasaan, emosional, pembentukan sikap di dalam diri pribadi seseorang dengan terbentuknya sikap, simpati, antipati, mencintai, membenci, dan lain sebagainya. Sikap ini semua dapat digolongkan sebagai kecerdasan

emosional. *Ketiga*, psikomotorik, adalah berkenaan dengan tindakan, perbuatan, prilaku, dan seterusnya.

Apabila disinkronkan ketiga ranah tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek pendidikan budi pekerti dicapai mulai dari memiliki pengetahuan tentang sesuatu, kemudian memiliki sikap tentang hal tersebut, dan selanjutnya berperilaku sesuai dengan apa yang diketahuinya dan apa yang disikapinya.

Pendidikan budi pekerti, adalah meliputi ketiga aspek tersebut. Seseorang mesti mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk. Selanjutnya bagaimana seseorang memiliki sikap terhadap baik dan buruk, dimana seseorang sampai ke tingkat mencintai kebaikan dan membenci keburukan. Pada tingkat berikutnya bertindak, berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebaikan, sehingga muncullah akhlak atau budi pekerti mulia.

Sebagaimana dinyatakan oleh Ki Hajar Dewantoro (1977), bahwa supaya nilai yang ditanamkan dalam pendidikan tidak tinggal sebagai pengetahuan saja, tetapi sungguh menjadi tindakan seseorang, maka produk pendidikan mestinya memperhatikan tiga unsur secara terpadu, yaitu "*ngerti-ngerasa-ngelakoni*" (mengetahui/memahami, memiliki/menghayati dan melakukan). Hal tersebut mengandung pengertian bahwa agar pendidikan budi pekerti dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka hendaknya bentuk pendidikan dan pengajaran budi pekerti mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotor secara terpadu.

Hal senada disampaikan oleh Lickona (1992), bahwa dalam proses pendidikan moral/budi pekerti, hendaknya guru tidak semata-mata terfokus pada pemberian materi tentang konsep-konsep pendidikan moral/budi pekerti kepada peserta didik, tetapi yang lebih penting adalah terbentuknya karakter yang baik, yaitu pribadi yang memiliki pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan atau perilaku moral. Pernyataan tersebut semakin memperkokoh bahwa pendidikan moral hendaknya tidak hanya terfokus pada aspek kognitif saja, tetapi juga harus menyentuh pada aspek afektif dan psikomotorik.

Strategi Implementasi Pendidikan Budi Pekerti di Sekolah

Secara teknis, penerapan pendidikan budi pekerti di sekolah setidaknya dapat ditempuh melalui empat alternatif strategi secara terpadu. *Strategi pertama* ialah dengan mengintegrasikan konten kurikulum pendidikan budi pekerti yang telah dirumuskan ke dalam seluruh mata pelajaran yang relevan, terutama mata pelajaran agama, kwanegaraan, dan

bahasa (baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah). *Strategi kedua* ialah dengan mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. *Strategi ketiga* ialah dengan mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan yang diprogramkan atau direncanakan. Dan *strategi keempat* ialah dengan membangun komunikasi dan kerjasama antara sekolah dengan orang tua peserta didik.

Berkaitan dengan implementasi strategi pendidikan budi pekerti dalam kegiatan sehari-hari, secara teknis dapat dilakukan melalui:

a. Keteladanan

Dalam kegiatan sehari-hari guru, kepala sekolah, staf administrasi, bahkan juga pengawas harus dapat menjadi teladan atau model yang baik bagi murid-murid di sekolah. Sebagai misal, jika guru ingin mengajarkan kesabaran kepada siswanya, maka terlebih dahulu guru harus mampu menjadi sosok yang sabar dihadapan murid-muridnya. Begitu juga ketika guru hendak mengajarkan tentang pentingnya kedisiplinan kepada murid-muridnya, maka guru tersebut harus mampu memberikan teladan terlebih dahulu sebagai guru yang disiplin dalam menjalankan tugas pekerjaannya. Tanpa keteladanan, murid-murid hanya akan menganggap ajakan moral yang disampaikan sebagai sesuatu yang omong kosong belaka, yang pada akhirnya nilai-nilai moral yang diajarkan tersebut hanya akan berhenti sebagai pengetahuan saja tanpa makna.

b. Kegiatan spontan.

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilaksanakan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat guru mengetahui sikap/tingkah laku peserta didik yang kurang baik, seperti berkelahi dengan temannya, meminta sesuatu dengan berteriak, mencoret dinding, mengambil barang milik orang lain, berbicara kasar, dan sebagainya. Dalam setiap peristiwa yang spontan tersebut, guru dapat menanamkan nilai-nilai moral atau budi pekerti yang baik kepada para siswa, misalnya saat guru melihat dua orang siswa yang bertengkar/berkelahi di kelas karena memperebutkan sesuatu, guru dapat memasukkan nilai-nilai tentang pentingnya sikap maaf-memaafkan, saling menghormati, dan sikap saling menyayangi dalam konteks ajaran agama dan juga budaya.

c. Teguran.

Guru perlu menegur peserta didik yang melakukan perilaku buruk dan mengingatkannya agar mengamalkan nilai-nilai yang baik sehingga guru dapat

membantu mengubah tingkah laku mereka.

d. Pengkondisian lingkungan.

Suasana sekolah dikondisikan sedemikian rupa melalui penyediaan sarana fisik yang dapat menunjang tercapainya pendidikan budi pekerti. Contohnya ialah dengan penyediaan tempat sampah, jam dinding, slogan-slogan mengenai budi pekerti yang mudah dibaca oleh peserta didik, dan aturan/tata tertib sekolah yang ditempelkan pada tempat yang strategis sehingga mudah dibaca oleh setiap peserta didik.

e. Kegiatan rutin.

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah berbaris masuk ruang kelas untuk mengajarkan budaya antri, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, mengucapkan salam bila bertemu dengan orang lain, dan membersihkan ruang kelas tempat belajar.

Selanjutnya, untuk strategi pengintegrasian pendidikan budi pekerti ke dalam kegiatan yang diprogramkan, dapat direncanakan oleh guru melalui berbagai kegiatan seperti: bakti sosial, kegiatan cinta lingkungan, kunjungan sosial ke panti jompo atau yayasan yatim piatu atau yayasan anak cacat. Kegiatan ini penting dilakukan guna memberikan pengalaman langsung serta pemahaman dan penghayatan nyata atas prinsip-prinsip moral yang telah ditanamkan guru kepada peserta didik. Dengan berbagai kegiatan tersebut, diharapkan pendidikan budi pekerti tidak hanya berhenti pada aspek kognitif saja, melainkan juga mampu menyentuh aspek afektif, dan psikomotor peserta didik.

Dalam realitasnya antara apa yang diajarkan guru kepada peserta didik di sekolah dengan apa yang diajarkan oleh orang tua di rumah, sering kali kontra produktif atau terjadi benturan nilai. Untuk itu agar proses pendidikan budi pekerti di sekolah dapat berjalan secara optimal dan efektif, pihak sekolah perlu membangun komunikasi dan kerjasama dengan orang tua murid berkenaan dengan berbagai kegiatan dan program pendidikan budi pekerti yang telah dirumuskan atau direncanakan oleh sekolah. Tujuannya ialah agar terjadi sinkronisasi nilai-nilai pendidikan budi pekerti yang diajarkan di sekolah dengan apa yang diajarkan orang tua di rumah. Selain itu, agar pendidikan budi pekerti di sekolah dan di rumah dapat berjalan searah, sebaiknya bila memungkinkan orang tua murid hendaknya juga dilibatkan dalam proses identifikasi kebutuhan program pendidikan budi pekerti di sekolah. Dengan pelibatan orang tua murid dalam proses perencanaan program pendidikan budi pekerti di sekolah,

diharapkan orang tua murid tidak hanya menyerahkan proses pendidikan budi pekerti anak-anak mereka kepada pihak sekolah, tetapi juga dapat ikut serta mengambil tanggung jawab dalam proses pendidikan budi pekerti anak-anak mereka di keluarga.

Daftar Pustaka

- Dirjen Dikti, Depdikbud. (2003). *Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*. Bandung: Citra Umbara
- Haidar Putra Daulay, (2004). *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-1.
- Hasan Langgulung. (1988). *Asas-asas pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Ki Hajar Dewantara, (1977). *Pengajaran Budi Pekerti*. Yogyakarta: Taman Siswa, Bag.I.
- Kneller, G. F. (1967). *The philosophy of education*. New York: London-Sydney.
- Laska, J. A. (1976). *Schooling and education, basic concepts and problems*. New York: D. Van Nostrand Company.
- Madya Ekosusilo & Kasihadi. (1989). *Dasar-dasar pendidikan*. Semarang: Effar Publishing.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap bahasa Indonesia Modern*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, (1997). *Pedoman Pengajaran Budi Pekerti*. Jakarta: BP3K, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pusat Pengembangan Kurikulum, (2001). *Kurikulum Berbasis Kompetensi Mata Pelajaran Budi Pekerti untuk kelas I-VI SD*. Balitbang Puskur, Depdiknas.
- Soegarda Poerbakawatja, (1976). *Ensiklopedia Pendidikan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Tim Penyusun Kamus P3B Depdikbudn, (1991). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Edisi kedua.